



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR

POLICY BRIEF

PASOK PANGAN

DARI JAWA TIMUR KE NUSANTARA

*Hilirisasi Potensi Unggulan Daerah untuk
Meningkatkan Nilai Tambah dan Kemandirian Ekonomi*



TEMA :

Inovasi Kebijakan dalam Mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara melalui Penguatan SDM, Konektivitas Ekonomi, Hilirisasi Potensi Daerah, dan Transformasi Digital.



SUB TEMA :

Hilirisasi Potensi Unggulan Daerah untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Kemandirian Ekonomi.



RINGKASAN EKSEKUTIF SUMMARY

Ketahanan pangan merupakan pilar strategis pembangunan nasional dalam menghadapi perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dinamika ekonomi global, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Jawa Timur memiliki posisi yang sangat penting sebagai produsen pangan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Jawa Timur pada Januari–Juli 2026 mencapai sekitar 7,71 juta ton gabah kering giling (GKG), sedangkan produksi jagung berkisar 4,7–6,3 juta ton per tahun. Potensi tersebut didukung oleh sumber daya pertanian, infrastruktur transportasi, pelabuhan, kawasan industri, dan sumber daya manusia yang kompeten sehingga menjadi modal utama untuk memperkuat peran Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara sekaligus pusat logistik pangan nasional.

Namun, tingginya produksi belum sepenuhnya memberikan nilai tambah ekonomi. Sebagian besar komoditas masih dipasarkan sebagai bahan baku, sementara hilirisasi pangan, integrasi rantai pasok, transformasi digital, efisiensi logistik, dan investasi agroindustri belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya nilai tambah produk, tingginya biaya distribusi, kehilangan hasil pascapanen, serta belum optimalnya kesejahteraan petani dan daya saing industri pangan.

Hasil analisis SWOT dan IFAS–EFAS menempatkan pengembangan hilirisasi pangan Jawa Timur pada Kuadran I (Growth Strategy), sehingga diperlukan strategi ekspansif melalui penguatan agroindustri, integrasi rantai pasok, digitalisasi, peningkatan investasi, dan penguatan infrastruktur logistik. Policy brief ini merekomendasikan pengembangan Kawasan Agroindustri Pangan Terpadu, pembangunan sistem rantai pasok terintegrasi, implementasi **Jatim Smart Food System**, Program Akselerasi Investasi Agroindustri (PAIA), serta penguatan **Jatim Food Logistics Hub**. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas, kesejahteraan petani, daya saing pangan, serta memperkuat peran Jawa Timur sebagai pusat hilirisasi dan ketahanan pangan nasional.

I. PENDAHULUAN / LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional. Dalam menghadapi dinamika global, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Indonesia membutuhkan daerah yang mampu menjadi pusat produksi sekaligus distribusi pangan nasional.

Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis. Provinsi ini didukung oleh lahan pertanian yang luas, produktivitas tinggi, infrastruktur transportasi yang relatif lengkap, pelabuhan internasional, kawasan industri, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam sektor pertanian dan agribisnis.



Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Januari–Juli 2026 produksi padi Jawa Timur mencapai sekitar 7,71 juta ton GKG, tertinggi di Indonesia. Di sisi lain, produksi jagung mencapai kisaran 4,7–6,3 juta ton per tahun, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu sentra jagung nasional.

Potensi tersebut merupakan peluang besar untuk mendukung visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. Namun, besarnya produksi belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang optimal karena sebagian besar hasil pertanian masih dipasarkan sebagai bahan baku dengan nilai tambah rendah.

Pengembangan hilirisasi menjadi strategi penting agar komoditas pertanian tidak hanya meningkatkan volume produksi, tetapi juga meningkatkan kualitas, daya saing, nilai tambah, investasi, pendapatan petani, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

II. ANALISIS PERMASALAHAN

A. Deskripsi Masalah

1. Hilirisasi pangan masih terbatas

Pada tahun **2025**, Jawa Timur memproduksi **10,44 juta ton GKG** atau **6,03 juta ton beras** (BPS). Namun, sebagian besar padi dan jagung masih dipasarkan sebagai komoditas primer sehingga nilai tambah dan manfaat ekonomi belum optimal dinikmati di daerah.

2. Rantai pasok belum terintegrasi

Rantai pasok dari petani hingga pasar masih berjalan secara parsial sehingga menyebabkan tingginya biaya distribusi, kehilangan pascapanen, dan fluktuasi harga. Kondisi ini belum sebanding dengan besarnya produksi pangan Jawa Timur.

3. Tingginya biaya logistic

Distribusi pangan menuju Indonesia Timur dan IKN masih menghadapi biaya logistik yang tinggi akibat distribusi antarpulau dan belum meratanya infrastruktur, sehingga menurunkan daya saing produk pangan olahan.

4. Pemanfaatan teknologi digital belum optimal

Digitalisasi produksi, manajemen stok, *traceability*, dan distribusi pangan belum terintegrasi sehingga pengambilan keputusan belum berbasis data secara *real time* dan efisiensi rantai pasok belum optimal.

5. Rendahnya investasi agroindustri

Investasi industri pengolahan hasil pertanian masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara sentra produksi belum berkembang menjadi klaster agroindustri. Padahal, Jawa Timur menyumbang sekitar **17% produksi padi nasional**, sehingga memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi.

Analisi Isu Strategis

Berdasarkan analisis **SWOT**, isu strategis utama adalah **belum terwujudnya ekosistem hilirisasi pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir**. Meskipun Jawa Timur memiliki keunggulan sebagai produsen pangan terbesar di Indonesia, keterbatasan industri pengolahan, belum terintegrasinya rantai pasok, tingginya biaya logistik, rendahnya digitalisasi, dan investasi agroindustri yang belum optimal menyebabkan nilai tambah ekonomi belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan agroindustri, digitalisasi rantai pasok, peningkatan investasi, serta

kolaborasi multipihak untuk mewujudkan hilirisasi pangan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional.

Hasil analisis **IFAS–EFAS** menempatkan pengembangan hilirisasi pangan Jawa Timur pada **Kuadran I (Growth Strategy)**. menunjukkan bahwa kekuatan internal dan peluang eksternal lebih dominan dibandingkan kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah strategi ekspansi melalui penguatan agroindustri, digitalisasi rantai pasok, efisiensi logistik, dan peningkatan investasi agar nilai tambah komoditas pangan dapat dinikmati di Jawa Timur serta mendukung ketahanan pangan nasional. Hasil analisis IFAS–EFAS menempatkan pengembangan hilirisasi pangan Jawa Timur pada **Kuadran I (Growth Strategy)**. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan internal dan peluang eksternal lebih dominan dibandingkan kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah **strategi ekspansi melalui penguatan agroindustri, digitalisasi rantai pasok, efisiensi logistik, dan peningkatan investasi agar nilai tambah komoditas pangan dapat dinikmati di Jawa Timur serta mendukung ketahanan pangan nasional.**

C. Analisis Dampak Permasalahan

Apabila permasalahan hilirisasi pangan tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada:

1. **Rendahnya nilai tambah produk pertanian**, karena sebagian besar komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku.
2. **Lambatnya peningkatan kesejahteraan petani**, akibat terbatasnya industri pengolahan dan rendahnya nilai jual hasil panen.
3. **Tingginya biaya logistik dan kehilangan hasil (*food loss*)**, karena rantai pasok belum terintegrasi secara optimal.
4. **Menurunnya daya saing produk pangan**, akibat belum optimalnya digitalisasi, inovasi, dan investasi agroindustri.
5. **Belum optimalnya peran Jawa Timur sebagai pusat logistik dan hilirisasi pangan nasional**, sehingga peluang mendukung kebutuhan pangan Indonesia Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum dimanfaatkan secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan percepatan pengembangan agroindustri, integrasi rantai pasok, transformasi digital, peningkatan investasi, dan penguatan infrastruktur logistik untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta ketahanan pangan nasional.

B. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis **SWOT dan IFAS–EFAS**, pengembangan hilirisasi pangan Jawa Timur berada pada **Kuadran I (Growth Strategy)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki kekuatan dan peluang yang besar untuk mempercepat hilirisasi pangan melalui kebijakan yang bersifat ekspansif dan terintegrasi.

Alternatif kebijakan yang dapat ditempuh meliputi:

1. **Pengembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas unggulan**, khususnya padi dan jagung, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
2. **Integrasi rantai pasok pangan** dari petani, koperasi, industri pengolahan, distributor, hingga pasar melalui penguatan kelembagaan dan kemitraan.
3. **Percepatan transformasi digital sektor pangan** melalui sistem informasi terintegrasi yang mendukung produksi, *traceability*, manajemen stok, distribusi, dan pemasaran secara *real time*.
4. **Peningkatan investasi agroindustri** melalui kemudahan perizinan, pemberian insentif, dan pengembangan kemitraan pemerintah, swasta, BUMN, serta koperasi.
5. **Penguatan infrastruktur dan logistik pangan** melalui optimalisasi pelabuhan, pergudangan, pusat distribusi, dan konektivitas transportasi untuk mendukung Jawa Timur sebagai pusat logistik pangan nasional dan penyangga kebutuhan Indonesia Timur serta Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, memperkuat daya saing, meningkatkan kesejahteraan petani, menarik investasi, serta mewujudkan ekosistem hilirisasi pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

III. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Mengembangkan Kawasan Agroindustri Berbasis Komoditas Unggulan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu mengembangkan kawasan agroindustri berbasis padi dan jagung di sentra produksi melalui pembangunan industri pengolahan, pengeringan, penggilingan modern, penyimpanan, dan pengemasan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan petani. **Pengembangan Kawasan Agroindustri Pangan Terpadu (KAPT).**

2. Membangun Sistem Rantai Pasok Pangan Terintegrasi

Mewujudkan integrasi rantai pasok dari petani, koperasi, BUMD, industri pengolahan, distributor, pelabuhan, hingga pasar nasional melalui penguatan kelembagaan, kemitraan usaha, dan sistem distribusi yang efisien. Langkah ini diharapkan mampu menekan biaya distribusi, mengurangi kehilangan pascapanen (*food loss*), serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. **Integrasi Rantai Pasok Pangan Jawa Timur (Integrated Food Supply Chain).**

3. Mempercepat Transformasi Digital Ekosistem Pangan

Mengembangkan platform digital terintegrasi yang mencakup data produksi, stok, distribusi, pemasaran, dan *traceability* secara *real time*. Pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, efisiensi rantai pasok, transparansi perdagangan, dan akses pasar bagi petani serta pelaku usaha. **Jatim Smart Food System** (digitalisasi ekosistem pangan).

4. Meningkatkan Investasi dan Kemitraan Agroindustri

Mendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal dan nonfiskal, penyederhanaan perizinan, serta penguatan skema kemitraan antara pemerintah, swasta, BUMN, koperasi, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan. Kebijakan ini bertujuan mempercepat tumbuhnya klaster agroindustri di sentra produksi pangan.

Program Akselerasi Investasi Agroindustri (PAIA).

5. Memperkuat Infrastruktur Logistik dan Posisi Jawa Timur sebagai Hub Pangan Nasional

Mengoptimalkan jaringan logistik melalui penguatan pelabuhan, pergudangan, *cold storage*, pusat distribusi pangan, dan konektivitas transportasi menuju Indonesia Timur serta Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan ini akan meningkatkan efisiensi distribusi, memperkuat daya saing produk pangan olahan, dan mengukuhkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara sekaligus pusat logistik pangan nasional. **Jatim Food Logistics Hub** sebagai pusat logistik pangan untuk Indonesia Timur dan IKN.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik. (2026). *Produksi Padi Menurut Provinsi Tahun 2026*.
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2026). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2026*.
3. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2025). *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025–2029*.
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*.
5. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2025). *RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029*.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

PENULIS

MOCHAMAD SULUH,SH.,M.Si

